

## **POLITIK PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA MASA REFORMASI (1998-2024)**

Nurjana<sup>1</sup>, Muhammad Sirozi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

[1nurjanajana270@gmail.com](mailto:nurjanajana270@gmail.com),

[2msirozi@gmail.com](mailto:msirozi@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The Reformation period in Indonesia which began in 1998 brought significant changes in Islamic education policy. The method used in this paper is the literature study method. The approach used in this research is a descriptive approach qualitative. The data analysis technique used is content analysis. From this research it can be seen that several policies strengthen Islamic education, improve teacher quality, improve educational opportunities and infrastructure, and develop an inclusive Islamic education curriculum. The political policies of Islamic education at that time included several important aspects. First, the number of Islamic educational institutions such as Islamic boarding schools is increasing. Second, increasing the number of Muslim teachers. Third, more attention is given to the development of Islamic educational institutions and infrastructure. Fourth, the aim is to develop an inclusive Islamic curriculum. The government has taken concrete steps to strengthen Islamic education, improve teacher quality, improve facilities and infrastructure, and develop an inclusive curriculum.*

*Keywords: reformation period, politics, islamic education*

### **ABSTRAK**

Masa Reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan yang signifikan dalam kebijakan pendidikan Islam. Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah metode studi kepustakaan atau *libarary research* jenis penelitiannya merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten. Dari penelitian ini dapat diketahui beberapa kebijakan memperkuat pendidikan Islam, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan kesempatan dan infrastruktur pendidikan, serta mengembangkan kurikulum pendidikan Islam inklusif. Kebijakan politik pendidikan Islam pada masa itu meliputi beberapa aspek penting. Pertama, jumlah lembaga pendidikan Islam seperti pesantren meningkat. Kedua, meningkatkan guru muslim meningkat. Ketiga, perhatian lebih diberikan pada pengembangan lembaga dan infrastruktur pendidikan Islam. Keempat, tujuannya adalah mengembangkan kurikulum Islam yang inklusif. Pemerintah telah mengambil langkah konkrit untuk memperkuat pendidikan Islam, meningkatkan kualitas guru, memperbaiki sarana dan prasarana, serta mengembangkan kurikulum inklusif.

Kata Kunci: masa reformasi, politik, pendidikan islam

## **A. Pendahuluan**

Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya (*civilized*). Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan politik yang diterapkan bertujuan untuk memperkuat pendidikan agama Islam, meningkatkan kualitas guru, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta mempromosikan nilai-nilai keagamaan, keberagaman, dan toleransi dalam masyarakat. Selain itu, pemerintah juga telah berkomitmen untuk melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam. (Rosyada 2017)

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan pendidikan bagi semua warga negara Indonesia, termasuk dalam pendidikan Islam. Selanjutnya, kebijakan politik pendidikan Islam di Indonesia juga mengedepankan peningkatan kualitas guru. (Bahri 2022) Melalui pelatihan dan pengembangan

kompetensi, guru pendidikan Islam diberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan pengajaran, pemahaman terhadap ajaran agama, dan penguasaan metode pembelajaran yang inovatif. Peningkatan kualitas guru ini diharapkan dapat membawa dampak positif pada pembelajaran agama Islam di sekolah-sekolah.

Pengembangan kurikulum pendidikan Islam juga menjadi fokus dalam kebijakan politik pendidikan di Indonesia. (Selamet dan Zaqiah 2022) Kurikulum pendidikan Islam diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik. Kurikulum yang diperkaya dengan nilai-nilai keagamaan, keberagaman, dan toleransi diharapkan dapat membentuk generasi muda yang inklusif dan menghargai perbedaan agama. (Hidayat, Firdaus, dan Somad 2020) Program ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman agama, mempromosikan kerukunan antaragama, dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan yang memperkuat hubungan antarumat beragama.

Secara keseluruhan, politik pendidikan Islam di Indonesia

selama periode reformasi hingga saat ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam, memperkuat keberagaman dan toleransi, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, kebijakan politik ini memberikan harapan untuk pengembangan pendidikan Islam yang lebih baik dimasa depan.(Jannah dkk. 2019)

Dalam artikel ini, akan dibahas politik pendidikan Islam di Indonesia sejak masa reformasi hingga saat ini. Serta akan mengupas berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah, peran lembaga pendidikan Islam, pengembangan kurikulum pendidikan Islam, dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam konteks politik pendidikan Islam. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan politik pendidikan Islam di Indonesia sejak masa reformasi hingga saat ini.

Dengan demikian, pendidikan Islam di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang positif dalam

pembangunan masyarakat yang berakhlak, berpengetahuan, dan toleran.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah metode studi kepustakaan atau *library research* jenis penelitiannya merupakan penelitian kualitatif deskriptif(Zed 2008) yakni dengan menyimpulkan data dari beberapa literature berupa buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan dan profil lulusan lembaga pendidikan Islam.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Masa Reformasi 1998**

Masa Reformasi 1998- Sekarang dimulai setelah pengunduran diri Presiden Soeharto. Masa ini ditandai oleh perubahan politik, sosial, dan ekonomi yang signifikan dalam upaya membangun demokrasi yang lebih inklusif di negara ini. (M. A. Lubis 2020) Beberapa perubahan penting yang terjadi di antaranya adalah penghapusan Monopoli Partai Politik, revisi konstitusi, pemilihan presiden dan legislatif langsung, dan peningkatan kebebasan pers dan hak asasi manusia.(ANZAR

ABDULLAH t.t.)

Saat ini, Indonesia masih terus mengalami perkembangan di berbagai bidang. Pemerintah dan masyarakat berusaha untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan perekonomian, dan memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, masih banyak masalah yang perlu diatasi,(Khaeruddindan Rahmania 2022) seperti ketimpangan sosial, korupsi, dan isu lingkungan. Era reformasi memberi ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner.(Jannah dkk. 2019) Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara.

Ada beberapa poin penting terjadinya reformasi yaitu dengan runtuhnya rezim Soeharto saat tahun 1998. Indonesia saat itu mengalami

krisis ekonomi yang parah hingga terjadilah protes oleh mahasiswa dan demonstrasi masa hingga Soeharto menggundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa.(Sibuea 2017) Beberapa langkah yang diambil termasuk perubahan UUD 1945,(Mirsal 2017) pengesahan undang-undang yang mengatur pemilu, dan pendirian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga independen.

Adanya kebebasan media pers dan memungkinkan munculnya berbagai media baru dan meningkatkan peran media sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Adanya upaya mengatasi kemiskinan, kesenjangan social, dan ketidakadilan ekonomi melalui kebijakan pembangunan dan program kesejahteraan social. Membawa perubahan positif, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Korupsi, konflik etnis dan agama, ketimpangan sosial-ekonomi, serta isu-isu lingkungan menjadi beberapa isu penting yang masih harus diatasi untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

## **2. Perjalanan Politik Pendidikan Masa Reformasi-Sekarang**

Pada masa Orde Baru, pendidikan Islam dianggap kurang mendapat perhatian dari pemerintah, dan pada masa reformasi agama pemerintah telah membuat beberapa upaya untuk memperbaiki keadaan. (Ikhwan 2017) Salah satu upaya pertama adalah pendirian Universitas Islam Negeri (UIN) di Jakarta pada tahun 1998. (R. R. Lubis 2021) UIN didirikan sebagai universitas Islam terkemuka dan tumbuh menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Selain itu, pada awal abad ke-21, pemerintah juga mencanangkan Program Pendidikan Agama dan Keagamaan (PAK) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam dengan menyediakan kurikulum yang lebih komprehensif dan terstruktur. (Samrin 2015)

Selain upaya-upaya dari pemerintah, pada masa reformasi muncul beberapa gerakan dari masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak pendidikan Islam. Misalnya pada tahun 2002 terjadi demonstrasi yang diprakarsai oleh Forum Komunikasi

Umat Islam (FKUI) menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan pendidikan Islam. (Suryana dkk. 2022) Berkat upaya pemerintah dan masyarakat sipil, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan selama masa reformasi. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya infrastruktur pendidikan dan konflik agama.

Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendidikan Islam yang dianggap kurang memadai pada masa Orde Baru. (Maghfuri 2020a) Beberapa kebijakan yang diterapkan adalah:

- a. Pendirian Universitas Islam Negeri—dimulai pada tahun 1998, dimana pemerintah Indonesia mendirikan Universitas Islam Negeri (UIN) sebagai upaya guna meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. UIN menjadi Lembaga pendidikan tinggi Islam yang terkemuka dan menjadi pusat pengembangan pendidikan

- Islam di Indonesia.(Didi 2020)
- b. Peningkatan Anggaran-Pemerintah Indonesia meningkatkan anggaran untuk semua pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Hal ini dilakukan guna memperbaiki infrastruktur dan memperluas akses pendidikan Islam di seluruh Indonesia .
- c. Program Pendidikan Anti Korupsi Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Pendidikan Agama dan Keagamaan (PAK) pada tahun 2004.(Tantowi 2022) Dimana program ini diluncurkan dengan bertujuan guna meningkatkan kualitas pendidikan Islam dengan menawarkan kurikulum yang lebih komprehensif dan lebih terstruktur.
- d. Pengembangan Sekolah Islam Internasional Pemerintah Indonesia mendirikan sekolah Islam internasional untuk menarik siswa dari negara tetangga yang ingin belajar di Indonesia.(Indra 2016) Hal ini juga akan membantu meningkatkan reputasi pendidikan Islam di Indonesia.
- e. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2004 sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola wakaf di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peran wakaf dalam mendukung pendidikan Islam di Indonesia.
- Perjalanan politik pendidikan dari masa ke masa. Masa Reformasi (1998-2004): Pada masa ini, terjadi perubahan dalam kebijakan politik dan pendidikan di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah umum. ("Reformasi Indonesia (1998–2024). Masa Konsolidasi (2004-2014): Pada masa ini, pemerintah fokus pada konsolidasi dan pengembangan lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah, universitas dan sekolah-sekolah umum.
- Kemudian dilanjutkan masa Pemerintahan Jokowi (2014-2024): Pemerintah Jokowi

memperkenalkan program unggulan yaitu wajib belajar 12 tahun, yang juga mencakup pendidikan agama Islam. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian pada pengembangan kualitas lembaga pendidikan Islam, melalui program sertifikasi guru dan pengadaan buku-buku pelajaran. Hingga sampai ke masa Pandemi Covid-19 (2020-sekarang): Pandemi Covid-19 membawa dampak yang signifikan pada sektor pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan agama Islam. Pemerintah harus menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan cara mengadakan pembelajaran jarak jauh. Namun, program pengembangan kualitas lembaga pendidikan Islam terus berjalan, termasuk dengan meningkatkan kapasitas guru dan pengembangan kurikulum.

Secara keseluruhan, perjalanan politik pendidikan Islam sejak masa Reformasi hingga sekarang menunjukkan adanya perhatian dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pada lembaga pendidikan Islam. Negara ini dianggap sebagai negara maju dengan pendidikan yang baik.

Sebaliknya, suatu negara dikatakan terbelakang jika pendidikan penduduknya sangat rendah.(Hoddin 2020).

Di setiap negara terdapat hubungan yang erat dan dinamis antara pendidikan dan politik. Pendidikan seringkali dijadikan sebagai alat dan tempat untuk mengajarkan dasar-dasar yang mendukung ideologi atau kerangka politik negara.(Huda 2020) Di negara-negara Barat, Plato mulai mengkaji hubungan antara pendidikan dan politik dalam bukunya *Republic*, yang membahas hubungan antara ideologi dan institusi negara serta tujuan dan metode pendidikan. Buku plato mendemonstrasikan bahwa dalam budaya helenik, sekolah merupakan kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik, gambaran adanya hubungan yang dinamis antara aktivitas kependidikan dan politik. Kedua ini merupakan dua sisi dari satu koin yang mungkin tak terpisahkan, adanya peletakan fundamental bagi kajian hubungan politik dan pendidikan dikalangan ilmuan generasi berikutnya.

Pada masa reformasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1989 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 12(1)(a) yang berbunyi: "Setiap peserta didik pada setiap lembaga/satuan pendidikan berhak "Untuk pendidikan. Agama menurut agama yang dianut dan diajarkan oleh ustadz yang sama" merupakan semangat baru bagi pembangunan pendidikan nasional, khususnya pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

UU No. 20 Tahun 2003 di atas lebih relevan dan aplikatif, ketika pada tahun 2013 lahir konsep kurikulum yang dikenal dengan Kurikulum 2013 (KURTILAS) yang merupakan kelanjutan dari kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004). tingkat satuan pendidikan. Kurikulum (2006). Ketika pada tahun yang sama dikeluarkan Permendikbud No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang menetapkan Kompetensi Inti terkait dengan nilai KI 1 (Sikap Pribadi) dan KI 2. (Sikap sosial) nilai pendidikan Islam, yaitu *habl mina Allah dan habl minan-nas*.

Sedangkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran pasca pandemi Covid-19, Kurikulum Merdeka, sebelumnya dikenal sebagai kurikulum prototipe, dirancang sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, dengan penekanan pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi siswa.

Menurut Menteri Pendidikan **Nadiem Makarim**, kurikulum ini dibuat lebih ringkas, sederhana, dan fleksibel untuk mengejar learning loss dan ketertinggalan dengan negara lain.

Beliau juga mengatakan kurikulum ini memiliki tiga unggulan antara lain lebih sederhana dan mendalam, siswa lebih bebas mengeksplorasi minat dan bakatnya, dan terakhir kurikulum ini lebih relevan dan interaktif. Pendidikan Islam pada masa reformasi yang membawa kemaslahatan besar bagi umat Islam, tidak lepas dari peran kebijakan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) yang peduli terhadap pendidikan Islam, khususnya kepada pihak-pihak yang beragama (Islam).

Adanya peningkatan pada akses pendidikan. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)(Yusup, Ismanto, dan Wasitohadi 2019) - Program ini ditujukan untuk membantu biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, dengan memberikan bantuan berupa uang tunai dan/atau subsidi biaya sekolah. Sehingga juga mereka memiliki kesempatan dalam menempuh pendidikan tanpa memikirkan biaya yang akan mereka tanggung. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk melalui program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Kerja, dan

Program Indonesia Pintar (PIP).

Program Satu Guru Satu Kelas (SGSK). Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil dan terisolasi, dengan memberikan setidaknya satu guru untuk setiap kelas di sekolah-sekolah di daerah tersebut.

Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki dan membangun sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Kebijakan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur fisik sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya.

Pemerintah juga memperhatikan peningkatan fasilitas pendukung, seperti perpustakaan, laboratorium, ruang seni, ruang olahraga, dan area permainan. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki fasilitas sanitasi di sekolah, seperti toilet yang bersih dan sehat, pengembangan infrastruktur teknologi pendidikan, seperti jaringan internet yang cepat dan tersedia di sekolah-sekolah.

Hal ini memungkinkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan komputer, perangkat lunak edukasi, dan akses ke sumber daya pembelajaran online. Pemerintah juga berupaya memperbaiki

sekolah-sekolah yang rusak akibat bencana alam atau kondisi yang kurang memadai.

Pemerintah menyediakan program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru program ini meliputi workshop, seminar, kursus, dan program sertifikasi, (Selamet dan Zaqiah 2022). Pemerintah mendorong penggunaan teknologi dalam pengembangan profesional guru termasuk akses ke platform pembelajaran online, sumber daya digital, forum diskusi online, dan program e-learning yang membantu guru memperoleh pengetahuan baru, berbagi pengalaman, dan mengikuti perkembangan terkini dalam bidang pendidikan, memberikan insentif termasuk kenaikan gaji dan tunjangan, bagi guru yang meningkatkan kualitas dan prestasi mereka.

Pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang mencakup semua level pendidikan, dari TK hingga perguruan tinggi. Kurikulum tersebut bertujuan guna memperkuat kualitas pendidikan Islam dan mempersiapkan generasi muda yang mampu bersaing di dunia global. Tujuan pengembangan kurikulum dalam pendidikan Islam adalah untuk membekali peserta didik dengan pendidikan yang holistik dan komprehensif dalam aspek agama, moral, budaya, dan akademik. (Supriadin 2014)

Adapun poin penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam sendiri yaitu

penentuan tujuan dan visi kurikulum yang mencakup identifikasi nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ingin ditanamkan kepada siswa dalam aspek keagamaan, moral, dan akademik. Kemudian Integrasi antara agama dan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dengan disiplin ilmu pengetahuan dan akademik lainnya. Pengajaran Al-Quran dan Hadis sebagai dasar pemahaman agama. (ANZAR ABDULLAH t.t.).

Kurikulum pendidikan Islam juga menekankan pembelajaran nilai-nilai dan etika Islam, seperti kejujuran, kesederhanaan, keadilan, belas kasihan, toleransi, dan tanggung jawab social. Selain aspek agama, kurikulum pendidikan Islam juga mencakup pengembangan keterampilan akademik seperti membaca, menulis, berhitung, berpikir kritis, dan berkomunikasi. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan penggunaan perangkat lunak, multimedia, sumber daya digital, dan platform pembelajaran online yang dapat meningkatkan efektivitas dan interaktifitas pembelajaran agama Islam.

Di Indonesia, kebijakan pendidikan agama di sekolah didasarkan pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "berbeda-beda namun satu". Tujuan praktik ini adalah agar pendidikan agama di sekolah mencakup keberagaman agama di Indonesia yang

mengedepankan toleransi, saling menghargai dan pemahaman antar umat beragama. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendidik generasi muda yang menghargai perbedaan agama dan mendorong keharmonisan masyarakat multikultural Indonesia.

Adanya penawaran pendidikan kejuruan Islam untuk mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja. Pendidikan kejuruan Islam ini juga dirancang untuk membantu mengembangkan sektor ekonomi Islam di Indonesia. (Syaiful 2018) Mengenai Madrasah Aliyah sebagai lembaga pendidikan Islam sekolah menengah atas yang menawarkan program pendidikan profesi keislaman pada mata pelajaran agama seperti Al Quran, Hadits, Fiqh dan Aqidah, serta mata pelajaran profesi seperti tata boga, tata busana, tata rias, tata rias, dan lain-lain keterampilan.

Beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia juga menawarkan program karir berbasis agama. Ada program profesional di bidang ekonomi Islam, perbankan Islam, hukum Islam, manajemen kantor Islam, dll. Kemudian ada Sekolah menengah Kejuruan Islam, lembaga pendidikan kejuruan pasca-sekolah menengah yang menawarkan program-program profesional khusus berdasarkan pendekatan Islam, mencakup mata pelajaran profesional seperti teknik mesin, teknik elektro, teknologi informasi, perawatan kesehatan dan bidang

profesional lainnya dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dan etika dalam kurikulum. Tidak kalah saing seperti pesantren lain di Indonesia, mereka juga menawarkan pelatihan kejuruan berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam.

Pemerintah Indonesia mengembangkan pendidikan Islam online untuk mempermudah akses pendidikan Islam bagi siswa di seluruh Indonesia. Pendidikan Islam online sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan Islam di seluruh negara (Hoddin 2020). Pengembangan pendidikan Islam online memberikan kesempatan bagi siswa, guru, dan masyarakat umum untuk mengakses pendidikan Islam secara fleksibel dan interaktif. Ini juga memungkinkan penyebaran pengetahuan agama yang lebih luas dan mendukung pendidikan inklusif bagi individu yang sulit mengakses pendidikan formal.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk mengakui dan memperingati Hari Santri setiap tanggal 22 Oktober sebagai bukti peran penting Santri dalam pelestarian dan pengembangan budaya Islam di Indonesia. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi mahasiswa dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan sosial.

## **2. Implikasi Kebijakan Politik**

### **Pendidikan Islam masa reformasi**

Beberapa implikasi kebijakan politik pendidikan Islam yang diterapkan di Indonesia (Maghfuri 2020b) pada masa reformasi hingga saat ini antara lain:

- a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Islam-Kebijakan politik pendidikan Islam yang diterapkan telah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Banyak siswa dari berbagai latar belakang sosial dan agama yang dapat mengakses pendidikan Islam yang berkualitas dan sejalan dengan tuntutan zaman.
- b. Penguatan Nilai-nilai Keagamaan dan Toleransi- Kebijakan politik pendidikan Islam juga memberikan pengaruh positif dalam penguatan nilai-nilai keagamaan dan toleransi di masyarakat. Dalam pendidikan Islam di Indonesia, siswa diajarkan tentang nilai-nilai agama dan moral yang universal, serta tentang pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan.
- c. Peningkatan Kesetaraan Gender Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia juga telah membantu

- memperkuat kesetaraan gender dalam pendidikan. Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan Islam.
- d. Peningkatan Keterampilan dan Daya Saing - Program pendidikan Islam kejuruan yang diterapkan oleh pemerintah juga memberikan dampak positif dalam peningkatan keterampilan dan daya saing siswa di dunia kerja. Dengan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dalam sektor ekonomi Islam, siswa akan lebih siap untuk memasuki dunia kerja dan menjadi kontributor dalam pengembangan ekonomi nasional.
- e. Peningkatan Akses Pendidikan di Wilayah Terpencil. Kebijakan pendidikan Islam online yang diterapkan oleh pemerintah juga memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada siswa di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Ini memungkinkan siswa yang tidak dapat mengakses pendidikan Islam secara fisik untuk tetap mendapatkan akses pendidikan Islam yang berkualitas.

Adapun beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti kurangnya dana pendidikan, dan masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah, khususnya di wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Pemerintah Indonesia masih berupaya lebih keras untuk mengatasi tantangan tersebut agar dapat memperkuat pendidikan Islam dan meningkatkan kualitas pendidikan secara umum.

### **3. Lembaga pendidikan Islam masa Reformasi-sekarang**

Berikut adalah beberapa lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia pada masa Reformasi sampai dengan saat ini: (Didi 2020)

1. Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah lembaga pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan Islam dan pendidikan umum secara terpadu. Sekolah ini berada di bawah naungan Kementerian Agama dan sudah terdapat sejak masa Orde Baru, namun hingga saat ini tetap menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam yang banyak diminati.
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) adalah lembaga pendidikan menengah atas yang menyelenggarakan pendidikan Islam dan pendidikan umum secara terpadu. Keduanya juga berada di bawah naungan

Kementerian Agama dan terus berkembang hingga saat ini.

3. Pondok Pesantren, merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang menyediakan pendidikan dalam berbagai bidang, seperti tafsir, hadits, fiqh, dan bahasa Arab. Lembaga ini sudah ada sejak sebelum masa kemerdekaan Indonesia dan tetap eksis hingga saat ini.
4. Universitas Islam Negeri (UIN), adalah universitas yang menyediakan pendidikan Islam dan juga pendidikan umum di tingkat perguruan tinggi. UIN didirikan pada masa Orde Baru dan hingga saat ini tetap menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam terbesar di Indonesia.

Selain lembaga pendidikan di atas, saat ini juga terdapat beberapa lembaga pendidikan Islam modern yang mengusung konsep pendidikan yang lebih inovatif, seperti Sekolah Islam Terpadu (SIT), Pesantren Modern Gontor, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam di Indonesia terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

### **E. Kesimpulan**

Politik pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan yang

signifikan sejak reformasi hingga saat ini. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan telah menerapkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk memperkuat pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pengakuan resmi lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan pesantren sebagai penyelenggara pendidikan Islam yang berkualitas. Fokus lainnya adalah meningkatkan aksesibilitas pendidikan Islam melalui program-program seperti beasiswa dan meningkatkan kesempatan dan infrastruktur pendidikan. Kurikulum pendidikan Islam juga dirancang untuk membekali peserta didik dengan pendidikan yang bermakna dan komprehensif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- ANZAR ABDULLAH. t.t.  
"Pendidikan Islam Sepanjang Sejarah: Sebuah Kajian Politik Pendidikan di Indonesia." Diakses 04 Juni 2024. <https://journals.mindamas.com/index.php/susurgalur/article/view/68/69>.

- Bahri, Syamsul. 2022. "Meningkatkan Kualitas Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Melalui Sumber Daya Manusia di Era Pandemi." *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3 (1): 43–56.
- Didi, Didi Sartika. 2020. "Manajemen Pendidikan Tinggi Islam (Upaya Mereposisi dan Merekonstruksi Lembaga Pendidikan Tinggi Islam di Era Globalisasi)." *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 1 (2): 177–94.
- Dini, JPAU. 2021. "Lisik: Lima Pilar Kebijakan Internal Kepala RA Al Hijrah Badrul Ulum dalam Menciptakan Iklim Belajar Kondusif." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5 (2): 1915–29.
- Haerullah, Haerullah, dan Elihami Elihami. 2020. "Dimensi Perkembangan Pendidikan Formal dan Non Formal." *Jurnal edukasi nonformal* 1 (1): 199–207.
- Hidayat, Tatang, Endis Firdaus, dan Momod Abdul Somad. 2020. "Model Pengembangan Kurikulum Tyler Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah." *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam* 5 (2): 197–218.
- Hoddin, Muhammad Sholeh. 2020. "Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 14 (1): 15–30. <https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>.
- Huda, Miftahul. 2020. "Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Upaya Penguatannya dalam Sistem Pendidikan Nasional." *Journal of Islamic Education Research* 1 (02): 39–53.
- Ikhwan, Afiful. 2017. "Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi." *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)* 5 (1): 14–32
- Indra, Hasbi. 2016. "Pendidikan

- Tinggi Islam dan Peradaban Indonesia.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16 (1): 109-32.
- Jannah, Miftahol, Bachtiar Adi Sautra, Aminatus Sya’adah, dan Choirul Mahfud. 2019. “Sejarah reformasi pendidikan Islam di Indonesia.” *Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 8 (1): 38–46.
- Khaeruddin, Khaeruddin, dan Rahmania Rahmania. 2022. “Era Reformasi: Titik Balik Pendidikan Indonesia.” *Nubin Smart Journal* 2 (2): 16–25.
- Lubis, Maulana Arafat. 2020. *Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan:(PPKN) DI SD/MI: Peluang Dan Tantangan Di Era Industri 4.0*. Prenada Media.
- Lubis, Rahmat Rifai. 2021. “Universitas Islam Negeri (Studi Historisitas, Perkembangan dan Model Integrasi Keilmuan).” *Hikmah* 18 (2): 150–67.
- Maghfuri, Amin. 2020a. “Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi (1998-2004).” *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8 (1): 14–26.
- . 2020b. “Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi (1998- 2004).” *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8 (1): 14–26. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i1.614>.
- Ma’ruf, Ahmad Ma’ruf Ahmad. 2015. “KEBIJAKAN POLITIK KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA REFORMASI.” *Jurnal Al-Murabbi* 1 (1): 19–30.
- Mirsel, Robert. 2017. “Pembonceng Gratis Gerakan Reformasi Di Indonesia.” *Jurnal Ledalero* 13 (2): 239–62.
- Rosyada, Dede. 2017. *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah*. Kencana.
- Samrin, Samrin. 2015. “Pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.” *Al-Ta’dib* 8 (1): 101–16.